

## Hubungan Sumber Daya dan Struktur Birokrasi Protokol Kesehatan Terhadap Persepsi Penurunan Angka Kejadian Covid-19

Dewi Sayati<sup>1\*</sup>, Atma Deviliawati<sup>2</sup>, Hamyatri Rawalillah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang

\*Email : atic\_idkisumsel@yahoo.co.id

### Kata kunci :

Covid-19, sumber daya, struktur birokrasi.

### Keywords :

Covid-19, resources, bureaucratic structure.

### Info Artikel:

#### Tanggal dikirim:

17 Maret 2023

#### Tanggal direvisi :

3 Mei 2023

#### Tanggal diterima :

6 Juni 2023

#### DOI Artikel :

10.33862/citradeli  
ma.v7i1.352

Halaman: 39-44

### Abstrak

Peningkatan angka kejadian covid-19 masih terjadi setiap harinya, oleh karena itu dibutuhkan usaha yang sangat komprehensif dalam pengurusan kasus covid-19 dan cara untuk memutus mata rantai pemaparannya. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 per 31 Maret 2022 secara global dunia, total infeksi covid-19 sebanyak 486.661.998 kasus, kasus aktif covid-19 sebanyak 58.643.881 kasus, dan angka kematian mencapai 6.161.174 orang. Tujuan penelitian ini adalah diketahui hubungan sumber daya dan struktur birokrasi terhadap persepsi penurunan angka kasus covid-19 di SMK Bina Jaya Tahun 2022. Desain penelitian ini adalah deskriptif analitik, menggunakan pendekatan *cross sectional*. Sampel penelitian ini berjumlah 71 responden di SMK Bina Jaya Palembang, dan teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Kuesioner merupakan instrument pada penelitian ini. Uji statistik *chi square* yang digunakan sebagai analisis statistik, dengan 95% ( $\alpha=0,05$ ) tingkat kepercayaannya. Diperoleh hasil analisis sumber daya ( $p=0,004$ ), dan struktur birokrasi ( $p=0,003$ ), hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sumber daya dan struktur birokrasi terhadap persepsi penurunan angka kejadian covid-19. Sumber daya sangat dibutuhkan guna mendukung implementasi, seperti sumber daya manusia yang terlibat aktif dalam proses kebijakan, tersedianya fasilitas dalam menunjang kebijakan yang telah ditetapkan, sistem kesatuan yang memberikan sumber daya kewenangan secara terpusat kepada pemerintahan nasional serta struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan SOP yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan dalam implementasi kebijakan, seperti hubungan inter-organisasi sebagai teori kontingensi, sebagai analisis kasus, bagan subsistem kebijakan dan manajemen sektor publik. Simpulannya adalah terdapat hubungan bermakna antara sumber daya dan struktur birokrasi terhadap persepsi penurunan angka kejadian covid-19 di SMK Bina Jaya Palembang.

### Relationship between Resources and Bureaucratic Structure of Health Protocols on Perceptions of Decreasing Covid-19

### Abstract

The increase in the number of cases of COVID-19 is still happening every day, therefore, a very comprehensive effort is needed in managing the Covid-19 case and ways to break the chain of exposure. Based on data from the Covid-19 Handling Task Force as of March 31, 2022 globally, the total number of Covid-19 infections was 486,661,998 cases, active cases of covid-19 as many as 58,643,881 cases, and the death rate reached 6,161,174 people. This study aims to find out the relationship between resources and bureaucratic structure with the perception of a decrease in the number of Covid-19 cases at Bina Jaya Vocational School in 2022. The design of this study is descriptive analytic, using a cross sectional approach. The sample of this research is 71 respondents at SMK Bina Jaya Palembang, and the sampling technique uses accidental sampling. Resources are urgently needed to support the implementation, such as human resources who are actively involved in the policy process, the availability of facilities to support the policies that have been set, unitary system that gives centralized resources of authority to the national government as well as the bureaucratic structure including the dimensions of fragmentation and SOPs which have a significant influence on the success of policy implementation, such as inter-organizational relations as contingency theory, as case analysis, chart of public sector policy and management subsystems. The conclusion is that there is a significant relationship between resources and bureaucratic structure on the perception of a decrease in the incidence of Covid-19 at SMK Bina Jaya Palembang.

## PENDAHULUAN

Peningkatan angka kejadian covid-19 masih terjadi setiap harinya, oleh karena itu dibutuhkan usaha yang sangat komprehensif dalam pengurusan kasus covid-19 dan cara untuk memutus mata rantai pemaparannya (Kementerian Kesehatan RI., 2020). Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 per 31 Maret 2022 secara global dunia, total infeksi covid-19 sebanyak 486.661.998 kasus, kasus aktif covid-19 sebanyak 58.643.881 kasus, dan angka kematian mencapai 6.161.174 orang. 6.161.174 orang (Wulan, 2022).

Berdasarkan data Kominfo RI, angka kasus covid-19 di Indonesia mencapai 6.012.818 kasus dan angka kematian mencapai 155.089 Orang (per 31 Maret 2022), dapat kita lihat berdasarkan data ini bahwa penularan covid-19 di Indonesia masih berlangsung. Oleh karena itu, Pandemi covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia dan WHO secara resmi menyatakan Covid-19 menjadi pandemi pada 12 Maret 2020 (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI., 2022).

Bidang pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi di dunia sistem pendidikannya banyak yang mengalami perubahan dan rusak, akibatnya terhentinya proses pembelajaran bahkan sampai terjadi penutupan yang disebabkan oleh Pandemi corona virus disease-19 (Covid-19) ini. Bukan hanya cara penularannya saja yang sangat cepat dan besar, yang mengancam Kesehatan manusia, namun sangat mempengaruhi bidangekonomi, sosial, dan politik. Adapun perubahan proses pembelajaran di Indonesia sejak adanya pandemi covid-19 ini, yaitu dari proses pembelajaran tatap muka normal di kelas, berubah menjadi pembelajaran jarak jauh pada 16 Maret 2020 (Nirmala, 2021).

Terjadinya peningkatan jumlah kasus dan atau kematian karena penyebaran COVID-19 di Indonesia telah mencapai berbagai wilayah. Untuk itu, maka perlu disusun rencana dan langkah yang komprehensif guna menghindari dan menangani wabah COVID-19 di Indonesia yang semakin menakutkan dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta kesehatan melalui upaya pencegahan dan mitigasi Covid-19 (Yeti Kumalasari, 2022).

Pemerintah Indonesia memiliki banyak kebijakan dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran covid-19, salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia tersebut adalah dengan melakukan pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan

Covid-19. Supaya penerapan protokol kesehatan bisa berjalan dengan optimal, maka harus disertai dengan pengetahuan yang baik. Imbauan tentang protokol kesehatan telah disampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Salah satu strategi sekolah agar penerapan protokol kesehatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang ingin dicapai adalah dibentuknya tim satuan tugas (satgas) yang beranggotakan guru dan tenaga kependidikan, yang tugasnya adalah menyiapkan fasilitas, memastikan kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka supaya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali, serta memantau perkembangan kesehatan warga sekolah. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dapat dimanfaatkan oleh Sekolah untuk pengoptimalan fungsi ruang sebagai ruang penanganan bagi yang mengalami gejala Covid-19. Disediakkannya tempat cuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Semua civitas akademik di sekolah dapat menerapkan protokol kesehatan dengan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang sudah dibuat Sekolah (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI., 2021).

Rekapitulasi data jumlah konfirmasi positif covid-19 yang diperoleh Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan Januari 2022 berjumlah 99.192 kasus, bulan Februari 2022 berjumlah 114.172 kasus, dan pada bulan Maret 2022 berjumlah 118.261 kasus (Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan, 2021).

Pembicaraan terutama dalam hal kebijakan tentang mengatasi pandemi covid-19 di Indonesia belum optimal walaupun telah beberapa kebijakan diterbitkan, Pemerintah Indonesia belum bergerak cepat. Hal ini tampak dari artikel dalam bentuk narasi yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada pertengahan Januari yang menyatakan, "Masyarakat tidak perlu panic soal penyebaran virus korona, enjoy saja" (Satria, 2020).

Salah satu proses dari kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan. Edward III menyampaikan tentang Model implementasi kebijakan publik dan terdiri dari variabel-variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu sumber daya, dan struktur birokrasi (Widodo J, 2018).

Penelitian yang dihasilkan oleh Leo Agustino (2020) menunjukkan bahwa Sumber daya memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam hal penyediaan fasilitas sarana prasarana, seperti alat pelindung diri. Hal ini berkaitan erat dengan berhasil

atau tidaknya implementasi kebijakan penanganan covid-19 (Agutino, 2020).

Pendekatan implementasi Edward III dimana sumber daya yang menerangkan bahwa kompetensi dan kapabilitas, wewenang, pemanfaatan informasi dan fasilitas antar-aktor harus jelas dan pada struktur birokrasi, pengaturan pelaksanaannya harus konsisten sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang jelas mengenai protokol penanganan COVID-19 (Wisnu Wardhana, 2021).

Faedah implementasi adalah menerapkan, mengaplikasikan, melaksanakan, melakukan atau mengerjakan suatu aktivitas. Manakala aktivitas tersebut dihubungkan pada aktivitas pemerintah, maka termasuk dalam aktivitas publik (*public policy*). Bentuk dari kebijakan seperti aktivitas yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota (Andreas Delpiero Roring, 2021).

Survey awal yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui masih di dapati siswa/siswi yang belum optimal melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini dilihat dari siswa/siswi yang masih sering berkerumun di satu tempat, yaitu di halaman sekolah dengan posisi yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Serta

diketahui informasi bahwa terdapat sekitar 2% siswa yang menjadi suspek mendekati gejala covid-19, Persentase ini menurun dibandingkan beberapa waktu yang lalu, di SMK Bina jaya Palembang Tahun 2021. Dan didapati minimnya juga fasilitas dan SOP yang disediakan untuk protokol kesehatan, sehingga menimbulkan persepsi negatif siswa/siswa terhadap penurunan kasus covid-19.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai hubungan sumberdaya dan struktur birokrasi protokol kesehatan terhadap , angka kejadian covid-19 di SMK Bina Jaya Palembang Tahun 2022 dan juga pembahasan mengenai implementasi kebijakan khususnya tentang sumber daya dan struktur birokrasi belum begitu banyak.

## METODE

Desain penelitian ini adalah deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan *crosssectional*. Penelitian ini dilakukan di SMK Bina Jaya Palembang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa/siswi kelas 10 yang berjumlah 250 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 71 responden dihitung dengan rumus slovin dan dengan teknik *accidental sampling*. Uji statistic *chi square* yang digunakan sebagai analisis statistik dengan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) tingkat kepercayaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Univariat

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Penurunan Angka Kejadian Covid-10, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi.

No	Variabel	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1	Persepsi Penurunan Angka Kejadian Covid-19		
	▪ Menurun	65	91,5
	▪ Tidak Menurun	6	8,5
2	Sumber Daya		
	▪ Baik	58	81,7
	▪ Kurang Baik	13	18,3
3	Struktur Birokrasi		
	▪ Baik	50	70,4
	▪ Kurang Baik	21	29,6
	Jumlah	71	100

Tabel 1 diperoleh hasil yang menunjukkan dari 71 responden, responden yang menyatakan angka kejadian covid-19 menurun berjumlah 65 responden (91,5%), lebih banyak dari angka kejadian covid tidak menurun berjumlah 6 responden (8,5%), responden yang menyatakan sumber daya baik berjumlah 58 responden (81,7%), lebih banyak dari sumber daya kurang baik berjumlah 13 responden (18,3%), responden yang menyatakan struktur birokrasi baik berjumlah 50 responden (70,4%), lebih banyak dari struktur birokrasi kurang baik berjumlah 21 responden (29,6%).

**Analisis Bivariat**

Tabel 2. Hubungan antara Sumber Daya dan Struktur Birokrasi terhadap Persepsi Penurunan Angka Kejadian Covid-19

No	Variabel	Persepsi Penurunan Angka Kejadian Covid-19				Jumlah		P-Value
		Menurun		Tidak Menurun		n	%	
		n	%	n	%			
1	Sumber Daya							
	▪ Baik	55	94,8	3	5,7	58	100	0,004
	▪ Kurang Baik	10	76,9	3	23,1	13	100	
2	Struktur Birokrasi							
	▪ Baik	46	92,0	4	8,0	50	100	0,003
	▪ Kurang Baik	19	90,5	2	9,5	21	100	
	Jumlah	65	91,5	6	8,5	71	100	

Tabel 2 diperoleh hasil yang menunjukkan responden yang menyatakan sumber dayabaik dan angka kejadian covid-19 menurun berjumlah 55 responden (94,8%), lebih banyak dari sumber daya baik tetapi angka kejadian covid-19 tidak menurun berjumlah 3 responden (5,7%) dan uji statistic *chi-square* didapatkan *pvalue* (0,004), yang berarti ada hubungan bermakna antara sumber daya terhadap persepsi penurunan angka kejadian covid-19. Responden yang menyatakan struktur birokrasi baik dan angka kejadian covid-19 menurun berjumlah 46 responden (92,0%), lebih banyak dari struktur birokrasi baik tetapi angka kejadian covid-19 tidak menurun berjumlah 4 responden (8,0%) dan uji statistic *chi-square* didapatkan *value* (0,003), yang berarti ada hubungan bermakna antara struktur birokrasi terhadap persepsi penurunan angka kejadian covid-19.

**PEMBAHASAN**

**Hubungan sumber daya terhadap persepsi penurunan angka kejadian covid-19**

Sumber daya sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan guna mendukung implementasi. Secara umum, faktor sumber-sumber telah diamati sebagai salah satu faktor kesuksesan bagi kebijakan, seperti dalam hal sumber daya manusia yang terlibat aktif dalam proses kebijakan (Mazey, 2020), tersedianya fasilitas atau sarana prasarana untuk menunjang kebijakan yang telah ditetapkan (Dyer, 2021), serta sistem kesatuan yang memberikan sumber daya kewenangan secara terpusat kepada pemerintahan nasional (Bromfield & McConnel, 2020).

Edward III (dalam Widodo, 2018) menjelaskan bahwa sumber daya adalah termasuk elemen yang memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi kecukupan jumlah dan kompetensi aktor untuk melaksanakan tugas-tugasnya, tersedia informasi yang relevan tentang bagaimana melaksanakan kebijakan dan keterlibatan elemen-elemen tersebut; kejelasan dari jaminan kewenangan aktor supaya pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan, dan ketersediaan sarana prasarana yang dipakai untuk mentransplasikan kebijakan seperti

bangunan, kantor, peralatan, tanah, dana, dan lain-lain. Jika tidak tersedia dengan cukup baik, maka akan berakibat terhadap hukum dan peraturan yang dibuat tidak akan efektif ditegakkan, pelayanan tidak akan diberikan secara optimal. Jadi sumber daya dapat diartikan sebagai penyediaan berbagai hal dalam mendukung terselenggaranya implementasi kebijakan kesehatan dalam penerapan protokol kesehatan terhadap persepsi penurunan angka kejadian covid-19 (Widodo J, 2018).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Andreas Delpiero Roring, 2021) menunjukkan sumber daya yang dimiliki sudah cukup sesuai dengan standar sumber daya yang harus dimiliki. Ini berarti terdapat hubungan antara sumber daya terhadap persepsi penurunan angka kejadian covid-19. Dan sejalan juga dengan penelitian (Didik Try Putra dan Muhammad Nuh, 2021) yang menunjukkan aspek sumber daya baik itu sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya modal dan sumberdaya fasilitas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Semarang sudah cukup tersedia. Ini berarti terdapat hubungan antara sumber daya terhadap implementai kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Hasil penelitian menunjukkan sumber daya yang dimiliki oleh SMK Bina Jaya Palembang dalam

melaksanakan implementasi kebijakan tentang protokol kesehatan bentuknya seperti diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai protokol kesehatan dan kemudian di tempel di papan pengumuman dan madding SMK Bina Jaya Palembang, tersedianya sarana dan prasarana protokol kesehatan antara lain tempat cuci tangan yang mengalir dan sabun, masker, hand sinitiser, dana, dan sumber daya manusia baik pengelola maupun guru, telah tersedia dengan cukup baik, walaupun masih terdapat dalam sumber daya yang masih kurang yaitu sarana dan prasarana, seperti peralatan cuci tangan dengan air yang mengalir beserta sabunya yang masih sedikit dan dana untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah belum cukup tersedia. Semakin baik dan jumlah yang melebihi standar sumber daya yang dimiliki untuk dapat dipergunakan oleh siswa dan siswi, maka siswa dan siswi akan lebih mudah dalam melaksanakannya karena kebijakan protokol kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah menanggulangi covid-19, sehingga target yang telah ditetapkan, yaitu penurunan angka kejadian covid-19 pada siswa dan siswi khususnya bisa tercapai sesuai keinginan. Sumber daya melalui sumber daya manusia yaitu guru dan pengelola, fasilitas atau sarana prasarana protokol kesehatan seperti peralatan cuci tangan dengan air yang mengalir beserta sabunya, dan dukungan dana untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, karena sebagai penentu keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan itu sendiri dan merupakan hal yang paling penting dalam implementasi kebijakan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

### **Hubungan struktur birokrasi terhadap persepsi penurunan angka kejadian covid-19**

Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (terpecah-pecah) dan standar operasional prosedur diciptakan dikarenakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dalam implementasi kebijakan, seperti hubungan inter-organisasi sebagai teori kontingensi, sebagai analisis kasus, sebagai bagan subsistem kebijakan dan sebagai manajemen sector publik (Abrily, 2021).

Dimensi fragmentasi dan standar operasional prosedur yang merupakan badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Serta sangat berperan cukup

penting dalam implementasi kebijakan. Pada Birokrasi ini tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam institusi atau organisasi-organisasi yang terkait dalam kebijakan tersebut (Didik Try Putra dan Muhammad Nuh, 2021).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Roring (Andreas Delpiero Roring, 2021) menunjukkan struktur birokrasi baik terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Ini berarti terdapat hubungan antara struktur birokrasi dengan penanganan virus corona. Hasil penelitian ini menunjukkan struktur birokrasi telah dilaksanakannya secara efektif implementasi kebijakan protokol kesehatan covid-19, sehingga angka kejadian covid-19 di sekolah menurun bahkan tidak ada lagi yang terpapar. Salah satu faktor yang mendukung dalam efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor yang baik, apabila terfragmentasi atau terpecah-pecah dapat mengakibatkan gagalnya implementasi karena fragmentasi birokrasi dapat mempengaruhi le. Disamping itu dukungan para pejabat dan pimpinan pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Struktur birokrasi adalah struktur dan prosedur serta mekanisme kerja dalam implementasi kebijakan.

### **KESIMPULAN**

Terdapat hubungan bermakna antara sumber daya dan struktur birokrasi terhadap persepsi penurunan angka kejadian covid-19 di SMK Bina Jaya Palembang.

### **SARAN**

Menambah penyediaan sarana prasarana sebagai alat dalam penerapan protokol kesehatan, mulai dari rambu-rambu, alat cucian tangan dan sabunya serta bila diperlukan bentuk sanksi bila tidak melaksanakan protokol kesehatan, serta dengan secara rutin beserta rambu-rambunya, disamping membantu pemerintah dan juga dapat menurunkan serta mencegah pemaparan, sehingga terbebas dari kasus maupun suspek covid-19.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abrily, S. R. (2021). Implementasi Kebijakan Penerapan Protokol Kesehatan Di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kab. Banjar. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB. Online. <http://eprints.uniskabjm.ac.id/8426/1/Artikel%20Syam%20Rizky%20Abrily.pdf#>.

- Agutino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*. Vol.16 (2), 2020. 253-270. DOI:10.24258/jba.v16i2.685.
- Andreas Delpiero Roring, e. a. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid-19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Journal Governance*. Vol. 1, No. 2 . 1-11. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8426/>.
- Bromfield & McConnel. (2020). Two Routes To Precarious Success: Australia, New Zealand, Covid-19 And The Politics Of Crisis Governance. *International Review Of Administrative Sciences*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1177/0020852320972465>.
- Didik Try Putra dan Muhammad Nuh. (2021). Kajian Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang Tahun 2020. *SPEKTRUM*, Vol 18, No 2, 2021. 32-49. <https://spektrumfisip@unwas.ac.id/>.
- Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan. (2021). *Situasi Terkini Perkembangan Corona Virus Disease-19 (Covid-19)*. Palembang: Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan.
- Dyer, P. (2021). Policy And Institutional Responses To Covid-19: New Zealand. : <https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2021/01/MENA-COVID-19-SurveyNew-Zealand-.pdf>.
- Kementerian Kesehatan RI., 2. (2020). *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19). Revisi 5*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2022, Maret 31). *Situasi Covid-19 Di Indonesia*. <https://covid.go.id>
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. (2021). Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pembelajaran Tatap Muka pada Masa Pandemi COVID-19. Artikel. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id>.
- Mazey, S. (2020). Lesson-Drawing From New Zealand And Covid-19: The Need For Anticipatory Policy Making. *Political Quarterly*, 91(3), 561–570. <https://doi.org/10.1111/1467-923x.12893>.
- Nirmala, S. (2021). Implementasi Protokol Kesehatan Covid-19 Era New Normal Di Sdn 3 Batu Kumbang. Skripsi. Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
- Satria, J. N. (2020). Masyarakat Diminta Tidak Panik Soal Penyebaran Covid-19. <https://news.detik.com/>.
- Widodo J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creativ.
- Wisnu Wardhana, M. K. (2021). Analisis Kebijakan Publik Mengenai Penanganan Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Politics and Policy*. Vol.3, No.2, Juni 2021. 141-156. <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/download/41/36.-,->.
- Wulan, N. A. (2022). Update Covid-19 Global-Infeksi Covid-19. <https://tribunnews.com/corona/2022/03/31/update-covid-19-31-maret-2022-infeksi-covid-19>: <https://tribunnews.com/corona/2022/03/31/update-covid-19-31-maret-2022-infeksi-covid-19>.
- Yeti Kumalasari, e. a. (2022). Perilaku Pencegahan Covid-19 Pada Pegawai Badan Narkotika. *Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kedokteran*. Vol. 9, No. 1. 619-628. DOI: <https://doi.org/10.33024/jikk.v9i1>.